



**SOLUSI KONTEKSTUAL  
UNTUK MENGURANGI  
MENGULANG KELAS DAN  
PUTUS SEKOLAH  
DI SEKOLAH DASAR**



**SOLUSI KONTEKSTUAL  
UNTUK MENGURANGI  
MENGULANG KELAS  
DAN PUTUS SEKOLAH  
DI SEKOLAH DASAR**

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020

# **SOLUSI KONTEKSTUAL UNTUK MENGURANGI MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR**

## **Penulis:**

Ir. Siswantari, M.Sc. (Kontributor Utama)  
Darmawan Sumantri, S.Si. (Kontributor Anggota)  
Dyah Suryawati, S.Si. (Kontributor Anggota)

**ISBN:** 978-602-0792-63-7

## **Penyunting:**

Drs. Philip Suprastowo, PU  
Dra. Lucia Hermien Winingsih, M.A., Ph.D.  
Ir. Yendri Wirda, M.Si.

## **Tata Letak:**

Tatik Soroeida, SE, M.A.P

**Desain Cover:** Genardi Atmadiredja, S. Sn., M.Sn.

**Sumber Cover:** pxhere.com

## **Penerbit:**

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **Redaksi:**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365  
Faks. +6221-5741664  
Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>  
Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, 2020

**PERNYATAAN HAK CIPTA**

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbang dan Perbukuan), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020 menerbitkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2019 dalam bentuk buku. Tujuan dari penerbitan buku hasil penelitian ini adalah sebagai upaya menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar bermanfaat bagi kalangan yang lebih luas dan dalam upaya mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Hasil penelitian ini telah dipaparkan di berbagai kesempatan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, masukan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun tetap akan diterima dengan tangan terbuka. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan acuan bagi pemangku kepentingan lainnya baik yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu mewujudkan penerbitan buku ini.

Jakarta, Agustus 2020  
Kepala Pusat,

Irsyad Zamjani, Ph. D

## KATA PENGANTAR

Pemerintah telah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun sejak tahun 2008. Sejak itu Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Sekolah Dasar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah siswa mengulang kelas dan putus sekolah sejak tahun 2014/2015 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018/2019, jumlah siswa mengulang kelas mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu jumlah siswa putus sekolah pada tahun 2018/2019 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan penggunaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah. Sejalan dengan penerapan Kurikulum 2013, tidak ada lagi siswa SD yang tinggal kelas/tidak naik kelas/mengulang kelas. Namun, data memperlihatkan masih banyaknya siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah. Kajian ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya mengulang kelas dan putus sekolah, serta mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan mengulang kelas dan putus sekolah yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu persiapan, pelaksanaan hingga terselesaikannya kajian ini. Temuan-temuan hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan oleh *stakeholders* pendidikan termasuk sekolah dalam mencegah anak mengulang kelas dan putus sekolah. Dengan demikian semua pihak termasuk sekolah dapat lebih berperan serta dalam mencegah siswa mengulang kelas dan putus sekolah.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

# DAFTAR ISI

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| KATA SAMBUTAN.....                                    | i   |
| KATA PENGANTAR.....                                   | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                      | iii |
| BAB I PENTINGNYA MEMPERHATIKAN SISWA SD YANG          |     |
| MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH: SUATU              |     |
| PENGANTAR.....                                        | 1   |
| A. KETENTUAN TENTANG MENGULANG KELAS .....            | 1   |
| B. PUTUS SEKOLAH, DAMPAK LANJUTAN DARI                |     |
| MENGULANG KELAS MELANGGAR UNDANG-UNDANG....           | 2   |
| C. PEMAHAMAN DAN PERMASALAHAN DAMPAK DARI             |     |
| MENGULANG KELAS .....                                 | 4   |
| D. PERMASALAHAN MENGULANG KELAS DAN PUTUS             |     |
| SEKOLAH .....                                         | 5   |
| E. STRATEGI DAN TAHAPAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN          |     |
| (MENGATASI TERJADINYA MENGULANG KELAS DAN             |     |
| PUTUS SEKOLAH) .....                                  | 6   |
| BAB II HAKEKAT DAMPAK MENGULANG KELAS.....            | 9   |
| A. KESIAPAN BELAJAR DAN PENYEBAB ANAK MENGULANG       |     |
| KELAS .....                                           | 9   |
| B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENGULANG KELAS           |     |
| DAN PUTUS SEKOLAH.....                                | 11  |
| C. <i>PROBLEM DRIVEN ITERATIVE ADAPTATION (PDIA):</i> |     |
| PENDEKATAN MENGATASI MASALAH.....                     | 12  |
| D. KERANGKA REKOMENDASI MENGATASI MASALAH             |     |
| MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH .....               | 13  |
| BAB III FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB        |     |
| MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH .....               | 15  |
| A. KORELASI ANGKA MENGULANG KELAS DAN PUTUS           |     |
| SEKOLAH DENGAN SEBELAS VARIABEL LAIN .....            | 16  |
| B. FAKTOR PENYEBAB MENGULANG KELAS DAN PUTUS          |     |
| SEKOLAH .....                                         | 17  |
| BAB IV TANTANGAN MENGATASI DI MASA MENDATANG .....    | 31  |
| A. REKOMENDASI TERKAIT PENYEBAB INTERNAL.....         | 32  |
| B. REKOMENDASI TERKAIT PENYEBAB EKSTERNAL .....       | 34  |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                   | 37  |





# **BAB I**

## **PENTINGNYA MEMPERHATIKAN SISWA SD YANG MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH: SUATU PENGANTAR**

Bab ini membahas tentang besarnya jumlah siswa SD yang mengulang kelas dan kecenderungan dampak lanjutannya terhadap putus sekolah. Mengulang kelas diketahui memberi dampak jangka panjang yang negatif terhadap kehidupan anak. Kendati pemerintah telah berupaya mencegah dengan menerapkan Kurikulum 2013, yang secara implisit mengungkapkan agar tidak ada lagi anak yang mengulang kelas, namun data memperlihatkan bahwa masih cukup banyak anak SD yang mengulang kelas dan juga putus sekolah. Kebijakan dan tindakan untuk tidak menaikan kelas ataupun menaikan kelas sebenarnya bagai memakan buah simalakama bagi kepala sekolah maupun guru. Di satu sisi, tindakan untuk tidak menaikan kelas berpeluang dapat mengurangi semangat/motivasi belajar siswa dan bahkan mengakibatkan putus sekolah. Di lain sisi, tindakan untuk menaikan kelas bagi siswa yang kemampuannya belum mencukupi untuk belajar di tingkat berikutnya, juga akan berakibat membebani guru untuk membimbing siswa di tingkat berikutnya. Persoalan-persoalan tersebut lebih komprehensif diuraikan dalam bab ini yang diawali dengan kebijakan yang terkait dengan mengulang kelas dan putus sekolah.

### **A. KETENTUAN TENTANG MENGULANG KELAS**

Pemerintah senantiasa berupaya untuk mencegah terjadinya anak mengulang kelas dan putus sekolah dengan berbagai kebijakan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, misalnya, telah memberikan arah kebijakan bahwa sejalan dengan dimulainya penerapan Kurikulum 2013, diamanatkan agar tidak ada lagi siswa SD yang tinggal kelas/tidak naik kelas/mengulang kelas. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa tidak semua sekolah melaksanakan arahan tersebut. Ada sekolah-sekolah yang tetap melakukan evaluasi belajar akhir kenaikan kelas, dan siswa yang memperoleh nilai di bawah standar tetap mengikuti ujian ulangan atau *remidial*. Kemendikbud hanya menetapkan aturan tidak ada mengulang kelas secara

garis besar saja, kebijakan teknisnya, termasuk jenis dan sistem remidinya diserahkan kepada masing-masing guru atau SD (Hidayatullah, 2013).

Ketentuan kenaikan kelas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pada pasal 9 bagian e menyatakan bahwa peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Selanjutnya pasal 10 ayat (1) menuangkan tentang mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, diantaranya (di bagian a) adalah penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik.

Definisi KKM yang dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan. Permendikbud ini juga menyatakan bahwa peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

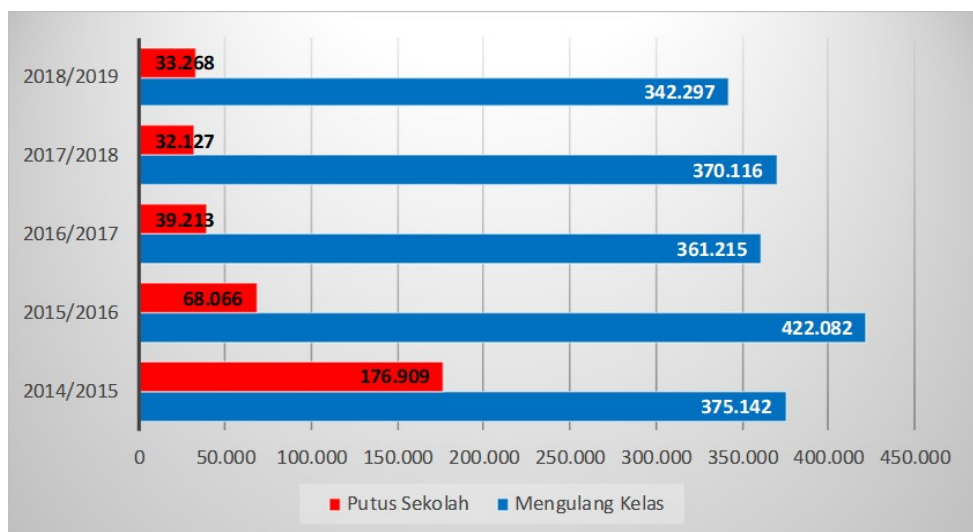
Pasal 10 ayat (1) Permendikbud Nomor 53 tahun 2015 menyatakan bahwa (1) Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. (2) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan/atau sikap belum baik.

Dengan demikian KKM digunakan sebagai acuan dalam menentukan ketuntasan belajar, *remedial*, pengayaan, dan kenaikan kelas.

## **B. PUTUS SEKOLAH, DAMPAK LANJUTAN DARI MENGULANG KELAS MELANGGAR UNDANG-UNDANG**

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan, setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Ketetapan dalam UU tersebut sering dikaitkan dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 tahun sebagai salah satu upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

Oleh sebab itu semua peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya minimal sampai pada jenjang pendidikan dasar tanpa ada yang putus sekolah. Harapan tersebut perlu diperhatikan oleh semua pihak, sebab terjadinya putus sekolah di jenjang pendidikan dasar khususnya pada siswa SD tersebut bertolak belakang dengan ketetapan UU Sisdiknas tersebut (Perhatidkk, 2017). Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada anak usia 7 s.d 15 tahun yang tidak bersekolah. Namun demikian, data memperlihatkan ternyata masih cukup banyak siswa SD yang mengulang kelas dan putus sekolah. Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah siswa mengulang kelas dan putus sekolah di SD per tahun secara nasional dalam kurun waktu tahun 2014/2015 s.d 2018/2019.



Gambar 1. Jumlah Siswa SD Mengulang Kelas dan Putus sekolah per Tahun dalam Kurun Waktu Tahun 2014/2015 s.d. 2018/2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa masih terdapat siswa SD yang mengulang kelas dan putus sekolah secara nasional dalam kurun waktu Tahun 2014/2015 s.d. 2018/2019 dengan jumlah yang cukup berarti. Siswa SD yang mengulang kelas dalam kurun waktu tersebut dari tahun ke tahun jumlahnya berfluktuasi. Demikian pula masih terdapat siswa putus sekolah dengan jumlah yang cenderung menurun terus pada empat tahun terakhir dan sedikit meningkat pada tahun pelajaran 2017/2018 ke 2018/2019. Meskipun kebijakan penghapusan tinggal kelas bertujuan baik agar siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya, namun dalam praktiknya di lapangan membingungkan para guru. Hal tersebut terjadi terutama ketika para guru menghadapi

kenyataan bahwa siswa tetap saja tidak mampu membaca dan menulis meskipun sudah berkali-kali diberikan remidi. Tentang hal ini, Kompas.com (2013) merangkum berbagai tanggapan kalangan dinas pendidikan dan guru-guru SD di beberapa kabupaten/kota. Inti dan kesimpulannya kalangan dinas pendidikan dan guru-guru SD keberatan dengan kebijakan penghapusan tinggal kelas. “Pemaksaan” menaikkan anak ke tingkat kelas berikutnya dengan kondisi kemampuan siswa yang masih belum mencukupi, akan semakin menyulitkan anak dalam mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Terlebih materi pembelajaran di tingkat kelas berikutnya semakin sulit.

Dampak lanjutan dari mengulang kelas adalah terjadinya kasus putus sekolah. Hubungan ini ditunjukkan oleh Wicaksono (2018), hasil penelitiannya menyimpulkan diantaranya, bahwa anak yang pernah tinggal kelas memiliki kecenderungan tidak melanjutkan pendidikannya. Alih-alih kebijakan tinggal kelas bertujuan mempersiapkan siswa supaya lebih baik dan lebih siap saat mengenyam pembelajaran di kelas selanjutnya, faktanya tidak ada data yang dapat menunjukkan hal tersebut. Efek tinggal kelas justru memiliki dampak jangka panjang yang negatif terhadap peluang melanjutkan sekolah.

### **C. PEMAHAMAN DAN PERMASALAHAN DAMPAK DARI MENGULANG KELAS**

Banyaknya siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah dapat mengindikasikan rendahnya kinerja pendidikan dan terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran pendidikan. Hal ini dikarenakan anggaran yang telah dialokasikan tidak mencapai *output* (kompetensi siswa) yang diharapkan. Jika siswa tinggal/tidak naik kelas, maka akan terjadi dua kali penganggaran untuk membiayai pendidikan siswa dalam kelas yang sama. Dengan demikian siswa mengulang kelas merupakan pemborosan, baik dari sudut pandang pendidikan maupun ekonomi, karena akan mengurangi kapasitas masuk sekolah bagi anak lain, menurunkan tingkat efisiensi internal (*input-output ratio*), dan menaikkan biaya pendidikan bagi pemerintah (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2016). Sedangkan jika siswa putus sekolah, maka anggaran yang dialokasikan menjadi tidak termanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan siswa.

Efek tinggal kelas juga memiliki dampak jangka panjang yang negatif terhadap peluang melanjutkan sekolah, artinya jumlah siswa tinggal kelas yang tinggi seperti diperlihatkan oleh data memberi peluang tingginya putus sekolah.

Di lain pihak, apabila siswa yang secara kompetensi belum mencapai ketentuan yang dipersyaratkan untuk naik kelas, akan tetapi siswa tersebut diberikan kelonggaran untuk terus naik kelas, maka dikhawatirkan siswa tersebut tidak dapat mengikuti atau mendapat kesulitan dalam mengikuti pelajaran pada tingkat berikutnya. Apabila kejadian tersebut terus berlanjut, maka siswa tersebut akan terbebani dalam menerima pelajaran dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi pada tingkat berikutnya.

#### **D. PERMASALAHAN MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH**

Hingga saat ini belum cukup banyak pemahaman tentang fenomena terjadinya siswa mengulang kelas dan putus sekolah. Mengapa dari tahun ke tahun hal tersebut terus terjadi, kendati berbagai pihak yang berkepentingan telah berupaya untuk mencegahnya? Tantangan yang segera harus dijawab, yakni mengapa hal tersebut terus terjadi, atau apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya mengulang kelas dan putus sekolah? Tantangan strategis berikutnya yakni, apakah upaya-upaya penanggulangan mengulang kelas dan putus sekolah yang telah dilakukan, serta alternatif kebijakan apa saja yang diperlukan guna mencegah terjadinya mengulang kelas dan putus sekolah di SD?

Guna menjawab pertanyaan tersebut diperlukan kajian yang bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan terjadinya mengulang kelas dan putus sekolah di SD, sekaligus untuk mengidentifikasi

1. faktor-faktor penyebab terjadinya mengulang kelas dan putus sekolah;
2. upaya-upaya penanggulangan mengulang kelas dan putus sekolah yang telah dilakukan.

## **E. STRATEGI DAN TAHAPAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN (MENGATASI TERJADINYA MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH)**

Berkenaan dengan tujuan tersebut, lingkup kajian ini difokuskan pada SD, yakni satuan pendidikan SD, baik negeri maupun swasta dengan melakukan:

1. Analisis data sekunder, nasional dan kabupaten/kota.
2. Verifikasi dan validasi data pada beberapa daerah tentang kebijakan/program yang dilakukan untuk menanggulangi mengulang kelas dan putus sekolah, serta efektivitas capaiannya.
3. Analisis data primer dari hasil verifikasi dan validasi data.

Adapun sasaran pengguna hasil kajian ini adalah Direktorat Pembinaan SD yang berada di tingkat pusat dan merupakan pembina nasional satuan pendidikan SD serta bertugas di antaranya mengembangkan kebijakan tentang mengulang kelas dan putus sekolah. Sasaran pengguna berikutnya adalah pemerintah kabupaten/kota, secara khusus dinas pendidikan kabupaten/kota yang mengelola SD di tingkat wilayah di antaranya dengan menjabarkan kebijakan pusat untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Sasaran pengguna selanjutnya yaitu Kementerian Agama, mengingat terjadinya mengulang kelas dan putus sekolah terkait erat dengan kegiatan keagamaan maupun kegiatan pendidikan yang bersifat keagamaan, seperti pesantren. Kantor dinas agama di tingkat kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama diharapkan dapat melakukan pembinaan di wilayah kerja masing-masing, dalam upaya mengatasi terjadinya mengulang kelas dan putus sekolah. Kementerian Sosial termasuk sebagai sasaran pengguna mengingat mengulang kelas dan putus sekolah sering terjadi pada anak-anak yang status sosial ekonomi orangtuanya kelas menengah ke bawah. Kementerian Sosial dalam hal ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan rendahnya status sosial ekonomi orangtua anak-anak yang mengulang kelas dan putus sekolah, terutama rendahnya penghasilan mereka dengan melakukan berbagai bentuk pembinaan.

Strategi tersebut menggunakan campuran pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) yang semuanya mengarah pada solusi mengatasi mengulang kelas dan putus sekolah di masa mendatang. Pendekatan kualitatif dilaksanakan melalui prosedur verifikasi dan validasi data dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT). Pendekatan kuantitatif dilaksanakan melalui pengumpulan data dengan cara pengisian angket/kuesioner.

Materi informasi DKT yang dikumpulkan adalah jumlah anak mengulang kelas dan putus sekolah, penyebab-penyebabnya, hambatan yang dihadapi dalam mengatasinya dan solusi yang dilakukan sekolah dan dinas pendidikan kabupaten. Mengenai data jumlah siswa mengulang kelas dan putus sekolah yang dari kelas I s.d kelas VI tahun 2017/2018 dikumpulkan dengan cara mengisi kuesioner yang sudah disiapkan.

Populasi kajian ini yaitu seluruh SD, baik SD negeri maupun swasta di Indonesia. Sampel kabupaten lokasi verifikasi dan validasi data ditentukan secara purposif, yaitu kabupaten yang memiliki jumlah siswa mengulang kelas dan putus sekolah yang tinggi, yaitu Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Bangkalan (Jawa Timur), dan Kabupaten Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur). Keterwakilan kecamatan lokasi SD pun dijadikan pertimbangan atas dasar tingginya siswa mengulang kelas dan putus sekolah. Peserta DKT dalam kajian ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten (Kepala Dinas, Kabid SD, Kepala seksi Kurikulum, dan Pengawas), Sekolah (Kepala sekolah dan guru), dan Komite Sekolah, yang secara keseluruhan berjumlah 14 orang, dengan rincian seperti tampak di Tabel 1.

Tabel 1. Peserta DKT di Tiga Kabupaten Sampel

| No. | Nama Kabupaten             | Jumlah Peserta DKT (orang)    |           |         |                |
|-----|----------------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------------|
|     |                            | Dinas Pendidikan/<br>Pengawas | Kepala SD | Guru SD | Komite Sekolah |
| 1.  | Kabupaten Bogor            | 5                             | 5         | 3       | 1              |
| 2.  | Kabupaten Bangkalan        | 4                             | 6         | 3       | 1              |
| 3.  | Kabupaten Sumba Barat Daya | 5                             | 6         | 3       | -              |

Pengisian kuesioner dilakukan oleh kepala sekolah untuk memperoleh data/informasi tentang data jumlah siswa mengulang kelas dan putus sekolah yang dari kelas I s.d kelas VI tahun 2017/2018

Pengolahan dan Analisis Data, selain didasarkan dari hasil DKT (data primer) juga dilakukan dengan menganalisis data sekunder. Analisis data sekunder

berasal dari PDSPK dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data sekunder dilakukan dengan mengorelasikan data mengulang kelas dan putus sekolah tahun 2016/2017 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan 10 variabel yang mempunyai korelasi. Penentuan variabel yang dianalisis juga dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder terbaru oleh BPS (Tahun 2016/2017). Tahun 2016/2017 dipilih sebagai tahun yang dianalisis mengingat tingginya AU dan APS pada tahun itu.

Pengolahan data dan informasi yang dikumpulkan dari DKT dilakukan dengan mengelompokkan data dan informasi yang sejenis yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan dengan data dan informasi yang merupakan hasil kajian sebelumnya yang relevan. Tahap akhir adalah merumuskan solusi dalam upaya mengatasi berbagai hambatan dalam menanggulangi permasalahan mengulang kelas dan putus sekolah.



## BAB II

### HAKEKAT DAMPAK MENGULANG KELAS

Bab ini terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama menguraikan pemahaman dan mendefinisikan tentang mengulang kelas dan penyebab-penyebabnya. Membahas pula hasil penelitian yang mengaitkan hubungan mengulang kelas dengan tingkat kesiapan anak belajar di SD juga dimunculkan di bab ini. Bagian kedua memberi batasan tentang putus sekolah, penyebabnya, juga faktor lain yang mempengaruhi keduanya yaitu lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan, seperti dituliskan oleh peneliti *World Health Organization* (WHO), Johnson (2018). Bagian ketiga tentang *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA) yang merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan secara umum, namun berpeluang diterapkan sebagai solusi mengatasi masalah mengulang kelas dan putus sekolah (INOVASI, 2017). Bagian terakhir, kerangka berpikir, memberikan gambaran logika berpikir dalam menghasilkan rekomendasi sebagai solusi mengatasi mengulang kelas dan putus sekolah.

#### A. KESIAPAN BELAJAR DAN PENYEBAB ANAK MENGULANG KELAS

Menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), angka mengulang (AU) adalah perbandingan antara jumlah siswa mengulang pada tingkat dan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Rumus AU:

$$\text{AU}_{jt} = \frac{\text{Mengulang}_{jt}}{\text{Siswa}_{jt-1}} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SM; t adalah tahun

Sumber: PDSPK, Kemdikbud

Semakin kecil AU, maka semakin banyak siswa yang dapat mengikuti pembelajaran di kelasnya dengan baik sehingga naik kelas. Ideal yang diharapkan adalah 0 persen, berarti semua siswa tidak ada yang mengulang.

Makin rendah nilai AU, berarti kinerja pendidikan semakin baik. Siswa mengulang kelas merupakan pemborosan, dari segi pendidikan maupun ekonomi karena mengurangi kapasitas anak-anak lain masuk sekolah, menurunkan efisiensi internal (*input-output ratio*), dan menaikkan biaya pendidikan bagi pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Mengulang kelas erat kaitannya dengan kesiapan anak belajar di SD. Secara psikologis, anak yang sebelumnya belajar di PAUD lebih siap belajar di SD dari pada anak yang tidak mengenyam PAUD. Berdasarkan hasil penelitian *Save the Children* (2000) di Nepal dalam Tujuh Alasan Pentingnya Pendidikan Anak PAUD Menurut Para Ahli (2015) menunjukkan bahwa tingkat kenaikan kelas di kelas 1 pada anak yang mendapatkan pendidikan usia dini dua kali lipat lebih tinggi dari anak-anak yang tidak mendapatkannya. Sebaliknya, jumlah kasus anak yang mengulang kelas dan putus sekolah jauh lebih tinggi terjadi pada anak yang tidak mendapatkan layanan PAUD. Sejalan dengan kajian ini, salah satu perlunya PAUD adalah penyelenggaraan dan fasilitasi anak usia dini secara holistik berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik motorik, kognitif, bahasa maupun perkembangan sosialnya menjadi lebih utuh dan lebih baik, sehingga dapat lebih mempersiapkan anak (kesiapan sekolah) mengikuti pendidikan yang lebih lanjut.

Menurut Wahab (2019), penyebab masih banyaknya anak SD yang tidak naik kelas adalah murni kesalahan guru, karena tidak mengenali masing-masing muridnya secara baik. Guru yang profesional akan berupaya keras mengenali setiap muridnya dengan baik. Menurut Danim (2002), ada dua perspektif dalam melihat guru yang profesional, dari latar belakang pendidikannya dan penguasaannya terhadap materi bahan ajar, mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lain-lain.

Penguasaan terhadap materi bahan ajar, mengelola siswa dan lain-lain dapat dikoreksi dan diperbaiki dengan pengalaman yang dimilikinya. Hal itu sejalan dengan pendapat Christina (1991) yang menyatakan salah satu dari lima keuntungan yang banyak diperoleh guru dari pengalaman mengajarnya adalah responsif terhadap masalah-masalah pengajaran terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.

## **B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH**

Putus sekolah dipahami sebagai proses berhentinya siswa secara terpaksa dari lembaga pendidikan tempatnya belajar atau terlantarnya anak dari lembaga pendidikan formal yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai (Musfiqon, 2007). Ahmad, N.S (2011) mendefinisikan putus sekolah, yaitu “berhenti belajarnya murid baik di tengah-tengah atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya berhenti sekolah”.

Nurhidayat (2017) mengungkapkan beberapa hal yang memengaruhi mengulang kelas dan putus sekolah adalah (i) lemahnya motivasi orangtua, (ii) rendahnya pendidikan orangtua, (iii) tingkat kemiskinan, (iv) rendahnya pelayanan keadilan bagi siswa, dan (v) lingkungan sekolah dan kelas yang tidak menyenangkan. Lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan terkait dengan berbagai hal, diantaranya adalah dengan kebutuhan dasar, yaitu sanitasi sekolah. Sehubungan dengan itu, Rick Johnson, peneliti utama WHO menyatakan bahwa pembangunan lingkungan sekolah yang berkualitas tidak dapat dilakukan jika kebutuhan dasar tentang sanitasi sekolah, yaitu toilet dan air bersih tidak dicukupi. (<https://www.cnnindonesia.com>, 2018).

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi mengulang kelas adalah rendahnya status sosial ekonomi yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua yang mengakibatkan lemahnya motivasi serta kemiskinan. Faktor lainnya adalah lingkungan sekolah dan kelas yang tidak menyenangkan, yang disebabkan antara lain kurangnya ketercukupan sanitasi sekolah.

Hasil penelitian Astari (2013) menyatakan bahwa variabel yang memengaruhi putus sekolah siswa SD (i) rasio siswa terhadap sekolah, (ii) rasio siswa terhadap guru, (iii) jumlah kepala keluarga dengan pendidikan terakhir ayah SD atau SMP, (iv) angka buta huruf, dan (v) rata-rata jumlah anggota keluarga. Dibandingkan dengan variabel lainnya, rasio siswa terhadap guru memiliki pengaruh yang paling besar.

Purbasari (2014) menyatakan bahwa yang memengaruhi putus sekolah adalah (i) persentase penduduk miskin, (ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, (iii) persentase pertumbuhan ekonomi, (iv) rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, (v) rasio guru terhadap murid, (vi) tingkat kesempatan kerja (TKK), (vii) persentase penduduk miskin, dan (viii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disintesis bahwa faktor-faktor yang memengaruhi putus sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal sekolah dan eksternal sekolah. Internal sekolah meliputi rasio siswa terhadap sekolah dan rasio siswa terhadap guru. Kedua faktor tersebut secara normatif mempengaruhi kenyamanan dan keefektifan pembelajaran di sekolah.

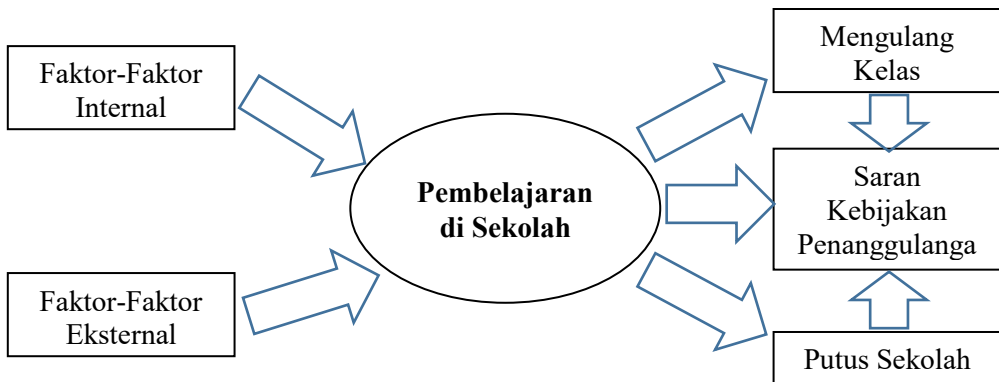
Faktor eksternal mencakup (i) jumlah kepala keluarga dengan pendidikan terakhir ayah SD atau SMP, (ii) angka buta huruf, (iii) rerata jumlah anggota keluarga, (iv) persentase penduduk miskin, (v) PDRB per kapita, (vi) persentase pertumbuhan ekonomi, (vii) rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, (viii) TKK, (ix) persentase penduduk miskin, dan (x) IPM. Dilihat dari jumlahnya faktor eksternal lebih banyak dibandingkan dengan faktor internal. Selain itu, faktor eksternal tersebut erat kaitannya dengan status sosial ekonomi keluarga, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

### ***C. PROBLEM DRIVEN ITERATIVE ADAPTATION (PDIA): PENDEKATAN MENGATASI MASALAH***

Mengulang kelas dan putus sekolah merupakan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui PDIA, yang menggunakan tahapan dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siapapun. Tahapan tersebut diawali dengan mencari akar penyebab terjadinya permasalahan, mengidentifikasi titik masuk terjadinya permasalahan, mencari solusi yang mungkin, mengambil tindakan, merefleksikan apa yang telah dipelajari, beradaptasi, dan kemudian bertindak lagi ([https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2018/01/171002-PDIAflyer-portrait\\_ID-1.pdf](https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2018/01/171002-PDIAflyer-portrait_ID-1.pdf), 2018). Menurut INOVASI ada sembilan tahap inti PDIA yaitu i) eksplorasi; ii) sintesis; iii) perancangan; iv) kaji ulang dan iterasi; v) rintisan; vi) evaluasi; vii) evaluasi; viii) berbagi; dan ix) penyebarluasan.

#### **D. KERANGKA REKOMENDASI MENGATASI MASALAH MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH**

Pembelajaran bagi siswa di sekolah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Setiap faktor internal dan faktor eksternal memiliki beberapa subfaktor. Semua faktor tersebut saling kait-mengait sehingga dapat menyebabkan proses belajar terganggu. Pada beberapa anak, faktor internal dan/atau faktor eksternal tersebut terjadi cukup/sangat berat sehingga mengganggu dan menghambat pembelajarannya dan menyebabkan anak tidak dapat berprestasi, bahkan harus mengulang kelas. Kejadian mengulang kelas juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Mengetahui alasan mengapa banyak anak harus mengulang kelas dan putus sekolah di SD sangat penting agar pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sekolah sehingga dapat mengurangi dan menghapus kedua hal tersebut. Untuk memudahkan, kerangka pikir disajikan di Gambar 2.



Gambar 2. Solusi Kontekstual Mengurangi Mengulang Kelas dan Putus Sekolah Di SD Dasar (Kerangka Pikir Kajian)



### **BAB III**

## **FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH**

**B**ab ini terdiri atas 3 sub bab, yaitu sub bab pertama analisis data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten secara nasional, sub bab kedua analisis data primer, dan sub bab ketiga analisis data primer dan data sekunder secara bersama-sama. Sub bab pertama memperlihatkan hasil korelasi AU dan APS dengan variabel lain yang relevan. Diketahui bahwa ternyata kesepuluh variabel pilihan menunjukkan berkorelasi secara signifikan dan konsisten dengan AU sedangkan tujuh variabel berkorelasi dengan APS. Dalam sub bab kedua, dikemukakan deskripsi faktor penyebab terjadinya putus sekolah, baik penyebab internal maupun eksternal. Sub bab ketiga, analisis data sekunder tiga kabupaten sampel untuk 11 variabel dibandingkan dengan data variabel yang sama untuk tingkat provinsi dan nasional, termasuk hasil penelitian yang relevan. Kesebelas variabel tersebut meliputi:

- 1) Persentase guru honorer
- 2) IPM
- 3) Rerata lama sekolah
- 4) Rerata pengeluaran per kapita
- 5) Persentase kelas awal non TK
- 6) Persentase kepala sekolah dan guru belum S1
- 7) Persentase kepala sekolah dan guru dengan masa kerja  $\geq 20$  tahun
- 8) Persentase SD belum memiliki kecukupan sumber air
- 9) Persentase SD yang memiliki toilet
- 10) Persentase SD yang diselenggarakan kombinasi
- 11) Persentase SD yang kekurangan ruang kelas.

## A. KORELASI ANGKA MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH DENGAN SEBELAS VARIABEL LAIN

AU dan APS tahun 2016/2017 berkorelasi positif sebesar 0,099 dan signifikan. Artinya kenaikan AU sebesar 0,099 poin akan meningkatkan putus sekolah sebesar 1 poin. Temuan ini memberikan perhatian kepada semua pihak yang berkepentingan agar fenomena mengulang kelas di SD perlu segera ditanggulangi, karena berpotensi menyebabkan putus sekolah.

Hasil analisis data sekunder korelasi AU dan APS dengan variabel lain dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Korelasi AU, APS dan Variabel Lain pada Tahun 2016/2017

| No. | Variabel Lain                                                                 | AU                     |            |     | APS                    |            |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|------------------------|------------|-----|
|     |                                                                               | Nilai Korelasi Pearson | Signifikan | N   | Nilai Korelasi Pearson | Signifikan | N   |
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                              | -0,438**               | √          | 512 | -0,247**               | √          | 511 |
| 2.  | Persentase siswa kelas awal non TK                                            | 0,286**                | √          | 514 | 0,166**                | √          | 513 |
| 3.  | Persentase Kepala Sekolah dan Guru belum S1                                   | 0,340**                | √          | 514 | 0,336**                | √          | 513 |
| 4.  | Persentase Kepala Sekolah dan Guru dengan masa kerja ≥ 20 tahun               | -0,299**               | √          | 514 | -0,143**               | √          | 513 |
| 5.  | Persentase SD memiliki sumber air dan cukup                                   | -0,289**               | √          | 514 | -0,159**               | √          | 513 |
| 6.  | Persentase SD memiliki toilet                                                 | -0,263**               | √          | 514 | -0,412**               | √          | 513 |
| 7.  | Proporsi SD penyelenggaraan kombinasi (pagi & siang)                          | -0,143**               | √          | 514 | 0,215**                | √          | 513 |
| 8.  | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 Kkal/kapita/hari | 0,443**                | √          | 34  | 0,103                  | -          | 34  |
| 9.  | Persentase penduduk miskin 2017                                               | 0,523**                | √          | 34  | 0,104                  | -          | 34  |
| 10. | Angka melek huruf 2016                                                        | -0,353**               | √          | 34  | 0,306                  | -          | 34  |

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016/2017 dan Pusat Data dan Statistik Pendidikan 2016/2017

\*\* berarti signifikan



Tabel 2 menunjukkan bahwa kesepuluh variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan mengulang kelas baik secara langsung maupun tidak langsung, diketahui berkorelasi secara signifikan dan konsisten. Hubungannya dengan APS pun memperlihatkan konsistensi. Konsisten dalam hal ini dapat diartikan bahwa kesepuluh variabel tersebut memiliki hubungan/korelasi, sesuai dugaan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu. Contohnya AU dan angka putus sekolah berkorelasi negatif secara signifikan dengan IPM, artinya semakin tinggi IPM akan semakin rendah AU dan angka putus sekolah.

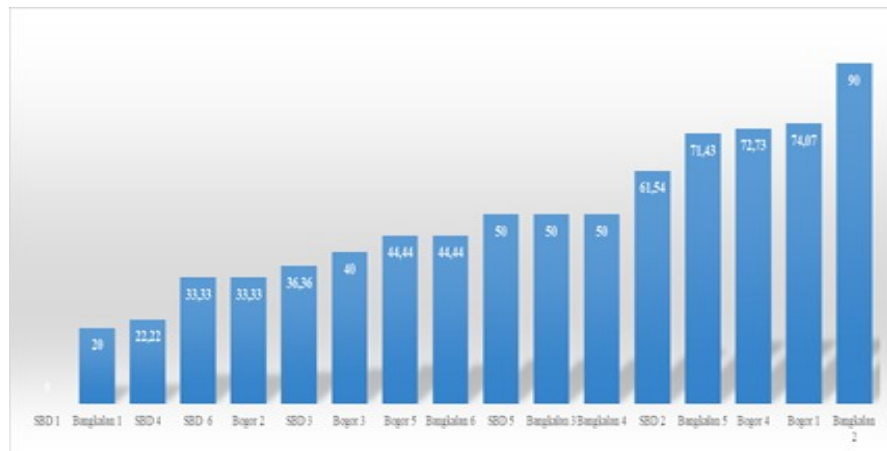
## **B. FAKTOR PENYEBAB MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH**

Penyebab mengulang kelas dan putus sekolah, secara internal maupun eksternal di tiga lokasi verifikasi dan validasi data adalah hampir sama.

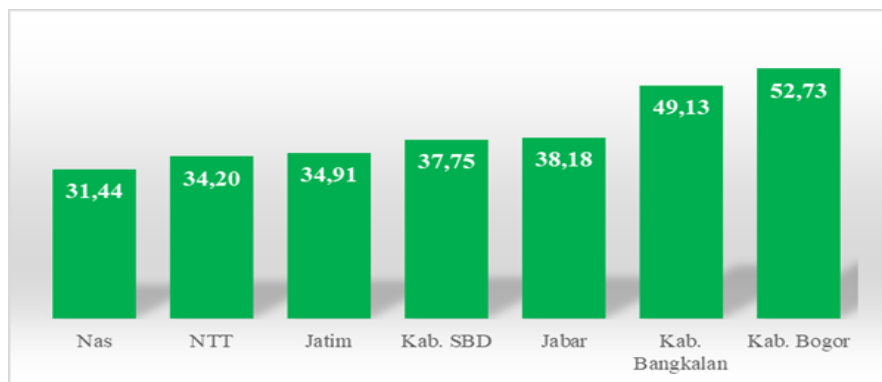
### **1. Faktor Internal**

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah penyebab yang berasal dari dalam lingkungan sekolah. Faktor internal meliputi guru dan prasarana pendidikan.

Faktor guru diketahui masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi mengajar dan substansinya belum cukup, dan banyaknya guru honorer. Guru honorer cenderung membebani sekolah dan membuat kepala sekolah “kurang berwibawa”. Hal ini bisa terjadi karena kepala sekolah dinilai kurang mampu menyejahterakan mereka, sehingga seringkali kebijakan kepala sekolah kurang dipatuhi oleh para guru honorer. Gambar 3 memperlihatkan persentase guru honorer di SD sampel cukup tinggi. Persentase tertinggi (90%) guru honorer terdapat di salah satu SD sampel di Kabupaten Bangkalan. Artinya salah satu SD di kabupaten tersebut paling tinggi persentase guru honorernya jika dibandingkan dengan rerata kabupatennya sendiri, kabupaten sampel, provinsi dan nasional pada tahun 2018/2019 (Gambar 4).



Gambar 3. Persentase Guru Honorer di SD Sampel



Gambar 4. Persentase Guru Honorer di Tiga Kabupaten Sampel, Provinsinya dan Nasional

Prasarana pendidikan juga merupakan faktor penyebab internal yang cukup penting untuk ditelusuri. Prasarana terutama jumlah ruang kelas minimal sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Sekolah yang diselenggarakan pagi dan siang (kombinasi), cenderung disebabkan oleh kekurangan jumlah ruang kelas. Di Kabupaten Bogor ada SD yang memiliki keterbatasan jumlah ruang kelas, sehingga dirasa perlu menyelenggarakan pendidikan kombinasi. Namun mengingat harus menyelenggarakan pembelajaran pada pagi hari saja, karena kalau siang hari khawatir tertimpa batu galian, maka ada kelas yang digabung, sampai jumlah siswanya lebih dari 50 siswa. Prasarana pendidikan lain yang penting untuk kenyamanan belajar siswa adalah ketersediaan sumber air yang cukup dan toilet. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar SD sampel tidak memiliki kecukupan ketersediaan sumber air dan toilet. Dengan demikian pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan ketersediaannya.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi rendahnya status sosial ekonomi orangtua, budaya, dan faktor geografis/lokasi yang sulit. Status sosial ekonomi orangtua siswa ditelusuri dari indikator rendahnya tingkat kesejahteraan dan persepsi terhadap pendidikan. Diketahui bahwa sebagian besar orangtua siswa sibuk bekerja dalam upaya mendapatkan penghasilan sampai tidak sempat memikirkan pentingnya pendidikan. Hal ini terjadi karena seringkali orangtua terpaksa harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain bekerja mencari penghasilan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Di Kabupaten Bangkalan, misalnya banyak orangtua siswa yang harus pindah ke kota lain, bahkan ke Kalimantan untuk bekerja. Meskipun awalnya anak-anaknya ditiptkan kepada neneknya, ada masa tertentu anaknya harus dibawa pindah di tempat kerjanya dan suatu saat datang lagi ingin melanjutkan pendidikan di sekolahnya, padahal sudah ketinggalan pelajaran. Oleh sebab itu anak-anak yang berada dalam kondisi seperti itu akan terhambat dalam mengikuti pelajaran dan berpotensi untuk tinggal kelas dan bahkan putus sekolah.

Untuk anak-anak dengan usia yang dianggap cukup untuk bekerja atau dapat membantu orangtuanya bekerja, orangtua akan meminta anaknya untuk ikut serta bekerja. Hal ini dilakukan oleh para orangtua untuk melatih anak-anak untuk bekerja sekaligus membantu orangtua memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pekerjaan mereka biasanya bersifat informal, seperti berdagang, berkebun, dan bertani.

Terkait faktor budaya, yang paling menonjol adalah kebiasaan warga masyarakat untuk menikah di usia muda, terlebih di kalangan kaum perempuan. Menurut UU tentang perkawinan, yang dikatakan usia muda apabila berumur kurang dari 19 tahun. Fenomena ini terjadi di tiga lokasi sampel. Budaya lainnya yang berpotensi mempengaruhi mengulang kelas dan putus sekolah adalah hari pasaran. Hari pasaran adalah hari diadakannya pasar sebagai tempat jual beli berbagai barang kebutuhan, biasanya 3 hari dalam seminggu. Di Kabupaten Bangkalan, hari pasaran adalah hari yang menggembirakan bagi anak-anak sehingga lebih baik tidak ke sekolah daripada tidak ikut orangtuanya ke pasar. Budaya lain di Kabupaten Bangkalan yang cukup menyita waktu pembelajaran di kelas adalah budaya Maulud Nabi. Pada umumnya, anak-anak dengan senang hati tidak pergi ke sekolah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan maulud di lingkungan tempat tinggalnya. Hampir setiap rumah

dan komunitas keagamaan di Kabupaten Bangkalan merayakan dengan meriah, keluarga dan komunitas menyediakan beragam makanan dan hiburan. Saat itu juga merupakan kebiasaan dan kesempatan siswa memperoleh uang dari orangtua dan mereka yang merayakan maulud nabi. Bahkan seringkali siswa diminta mewakili orangtuanya memenuhi undangan untuk menghadiri acara Maulud di tempat lainnya. Hal itu terjadi karena pada hari yang sama ada beberapa orang yang merayakan Maulud Nabi.

Lain halnya di Kabupaten Bangkalan, upacara yang seringkali memengaruhi tingkat kehadiran anak-anak di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah upacara kematian. Siswa biasanya hadir pada upacara kematian tersebut karena memiliki kesempatan makan babi yang merupakan pilihan makanan yang dinilai paling enak dan lezat. Biasanya upacara semacam itu bukan hanya dilakukan satu hari saja, prosesinya untuk satu orang jenazah bisa mencapai satu minggu. Dapat dibayangkan bagaimana menurunnya tingkat kehadiran siswa jika dalam suatu waktu atau beberapa minggu terjadi beberapa kematian berturut-turut. Kebiasaan siswa hadir dalam upacara kematian di hari sekolah tersebut berpotensi terhambatnya pencapaian hasil belajar siswa, tertinggal kemampuannya dengan siswa yang lain dan pada gilirannya bisa tinggal kelas, bahkan putus sekolah.

Secara geografis, kondisi lokasi sekolah dengan tempat tinggal siswa terutama di Kabupaten Sumba Barat Daya ditengarai menghambat partisipasi siswa untuk disiplin pergi ke sekolah. Di SD sampel di kabupaten tersebut ditemukan bahwa tempat tinggal siswa umumnya berada jauh dari sekolah dan kondisi perjalanannya sampai ke sekolah kurang mendukung. Penduduk di sekitar sekolah masih jarang, tersebar di pedesaan yang sulit dijangkau dan alat transportasi masih belum memadai. Kendala lokasi tempat tinggal siswa untuk pergi ke sekolah ini seringkali menjadi penyebab absensi siswa yang tinggi sehingga proses dan hasil belajar siswa tidak optimal. Selanjutnya bisa berakibat siswa mengulang kelas

Jika terjadi siswa mengulang kelas karena faktor-faktor ekonomi, budaya dan geografis serta faktor penyerta lainnya maka dampak lanjutannya adalah terjadinya putus sekolah. Variabel mengulang kelas mempunyai hubungan yang erat dengan putus sekolah. Siswa yang harus mengulang kelas, umumnya tidak termotivasi lagi untuk terus melanjutkan bersekolah. Hal ini terjadi antara lain karena malu dengan teman-teman sekolahnya, orangtua/keluarga menjadi berkurang perhatiannya, terlebih anak yang

berkali-kali tidak naik kelas. Secara ekonomi menambah berat beban ekonomi dan psikologi keluarga sehingga orangtua memutuskan lebih baik putus sekolah dan segera mencari pekerjaan atau membantu orangtua bekerja.

## 1. Upaya Menanggulangi Mengulang Kelas dan Putus Sekolah Yang Sudah Dilakukan

### a. Dinas Pendidikan Kabupaten

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan (di tiga lokasi sampel kajian) adalah meminta sekolah untuk:

- 1) Memberikan pelajaran tambahan bagi siswa-siswa yang berpotensi tidak akan naik kelas, untuk mencegah terjadinya siswa yang mengulang kelas, dan
- 2) Mengadakan kunjungan ke rumah siswa untuk memotivasi dan berupaya membantu siswa dan orangtuanya agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikannya (bersekolah).

### b. Sekolah

Sesuai arahan dinas pendidikan kabupaten, hampir semua SD sampel melakukan 2 kegiatan (memberikan pelajaran tambahan dan mengunjungi rumah siswa) tersebut dengan berbagai variasinya yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi masing-masing. Upaya penanggulangan lainnya yang tampak berbeda ditemukan di Kabupaten Bogor yang menekankan agar orangtua siswa tidak mengizinkan anak-anaknya putus sekolah dengan menyatakan bahwa mereka diminta mengganti biaya BOS yang sudah dikeluarkan pemerintah selama mereka mengikuti pendidikan sebanyak Rp.300.000 dikali dengan jumlah bulan selama siswa bersekolah. Upaya tersebut berhasil, karena jumlah siswa putus sekolah berkurang. Upaya lainnya adalah dewan guru dan komite sekolah menyosialisasikan tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan formal, disampaikan saat pertemuan-pertemuan dengan orang tua/wali murid. Namun demikian ditemukan pula SD yang masih merencanakan, berarti belum berupaya menanggulangi mengulang kelas dan putus sekolah. Kepala sekolah menyatakan baru **merencanakan** memberikan konseling atau membimbing siswa yang rawan mengulang kelas dan sekolah **merencanakan** kegiatan rohani siswa pada tahun ajaran baru guna

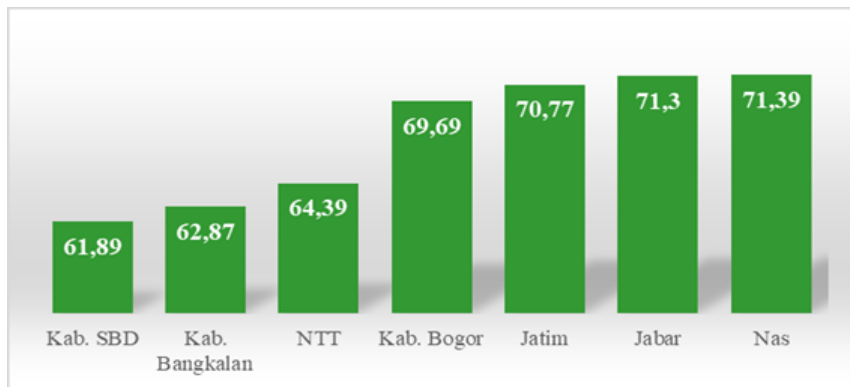
mendukung kesehatan mental siswa dengan melibatkan orangtua siswa, guru, komite sekolah dan pemerintah setempat.

Secara lebih mendalam hasil analisis data sekunder maupun hasil DKT dan hasil penelitian sebelumnya, memperlihatkan bahwa mengulang kelas dan putus sekolah memiliki hubungan yang cukup erat, baik disimak dari sisi eksternal maupun internal.

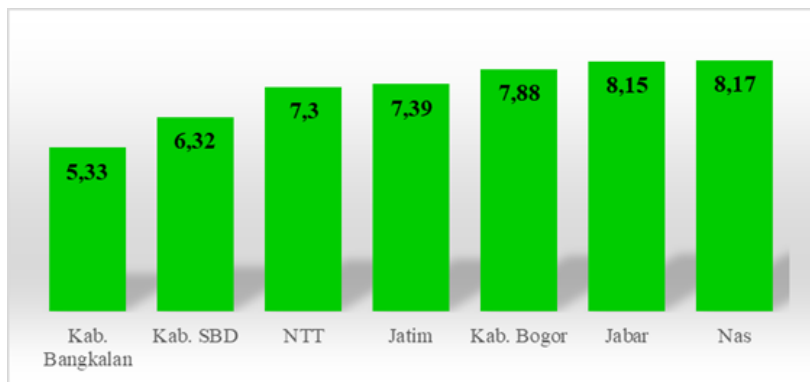
### 1. Faktor Eksternal

Dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya tampak bahwa kesepuluh variabel yang dikorelasikan dengan AU dan APS sejalan. Nurhidayat (2017) menemukan bahwa di antara beberapa variabel yang memengaruhi mengulang kelas adalah i) lemahnya motivasi orangtua, ii) rendahnya pendidikan orangtua, dan iii) tingkat kemiskinan. Hal itu diperkuat oleh temuan hasil penelitian Astari, dkk (2013) dan Purbasari (2014) bahwa di antara faktor yang memengaruhi putus sekolah adalah i) jumlah kepala keluarga dengan pendidikan terakhir yang rendah (ayah SD atau SMP), ii) angka buta huruf, iii) PDRB per kapita, iv) IPM, dan v) TKK.

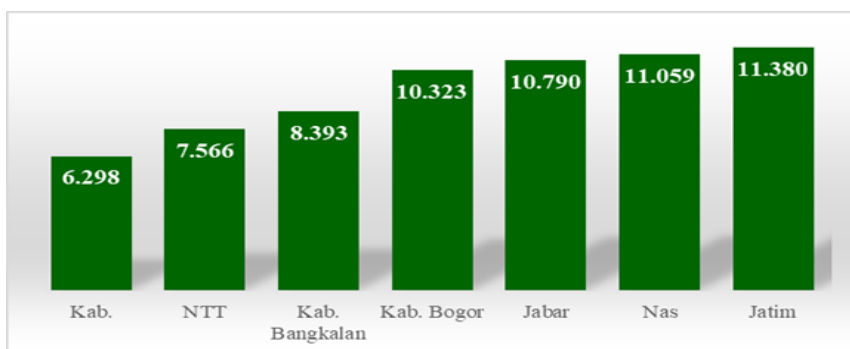
Variabel faktor eksternal yang pertama dikorelasikan adalah IPM (Lihat Gambar 5). Tiga indikator IPM adalah i) rerata lama sekolah (Lihat Gambar 6), ii) angka harapan lama sekolah, dan iii) Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Rerata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat termasuk tingkat pendidikan orangtua siswa. PNB per kapita juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan/kemiskinan masyarakat. Dalam hal ini menggunakan pendekatan rerata pengeluaran per kapita (lihat Gambar 7). Tampak di Gambar 5, 6, dan 7, kondisi di tiga kabupaten sampel memang kurang menggembirakan, berada di bawah rerata tingkat provinsinya maupun nasional.



Gambar 5. IPM di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional



Gambar 6. Rerata Lama Sekolah (Tahun) di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional



Gambar 7. Rerata Pengeluaran per Kapita (Rp. 000) di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional

Jumlah kepala keluarga dengan pendidikan terakhir ayah SD atau SMP menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan orangtua. Pendidikan orangtua yang rendah cenderung memiliki persepsi terhadap pendidikan yang juga rendah. Mereka berpendapat bahwa anak-anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa bekerja mencari uang untuk menopang kehidupan keluarganya. Sehubungan dengan itu persentase tingkat kesempatan kerja tampak jelas kaitannya dengan tingkat pendidikan orangtua, juga mengakibatkan pada kondisi kemiskinan orangtua. Oleh karena miskin maka saat masih anak-anak pun mereka diminta orangtua bekerja, baik secara mandiri maupun membantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Orangtua yang miskin biasa mengonsumsi makanan seadanya, jauh memenuhi jumlah kalori yang dibutuhkan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kalori/kapita/hari berarti dikategorikan penduduk miskin, karena penduduk miskin yang mengalami hal itu. Mereka tidak mampu mengonsumsi kalori yang lebih dari itu karena tidak mampu membeli bahan makanan tersebut (miskin). Dengan demikian hasil analisis data sekunder maupun hasil DKT menguatkan dugaan bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orangtua menjadi faktor yang berhubungan erat dengan mengulang kelas dan putus sekolah.

Terkait dengan budaya, upaya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat/adat/budaya/agama belum dilaksanakan, baru direncanakan. Mengingat cara mengatasi permasalahan budaya diatasi dengan pendekatan budaya pula, maka pelibatan mereka dalam mengatasi permasalahan diharapkan dapat segera diwujudkan.

## 2. Faktor Internal

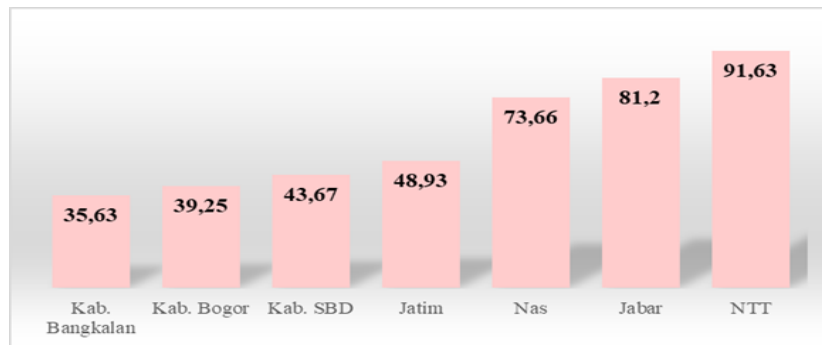
Faktor Internal yang dikaji meliputi siswa kelas awal non TK, pendidikan dan masa kerja Kepala Sekolah dan Guru, dan kecukupan sumber air dan toilet.

### a. Siswa kelas awal non TK

Berdasarkan persentase siswa kelas awal non TK, hasil korelasi memperlihatkan pentingnya mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di SD yang dapat diperoleh melalui TK, Kelompok Belajar (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Hal itu sejalan dengan pendapat para ahli *Save the Children* (2000) yang menyatakan bahwa anak-anak yang tidak mengikuti PAUD sebelum SD berpeluang mengulang kelas dua kali lipat dibandingkan mereka yang



sebelum SD belajar di PAUD. Selain itu PAUD juga meningkatkan kesiapan anak-anak untuk belajar di SD.



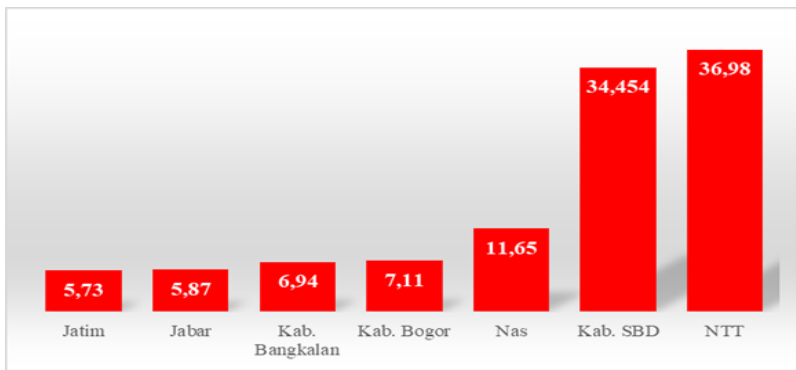
Gambar 8. Persentase Siswa Kelas Awal non TK di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada tahun 2018/2019

Tampak dalam Gambar 8, persentase siswa kelas awal non TK tahun 2018/2019 di tiga kabupaten sampel masih lebih rendah dibandingkan rerata nasional dan provinsinya masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak SD di tiga kabupaten sampel tidak mengikuti PAUD sebelum SD dan lebih berpeluang mengulang kelas karena anak-anak tersebut kurang memiliki kesiapan untuk belajar saat di SD.

#### b. Pendidikan dan masa kerja Kepala Sekolah dan Guru

Persentase kepala sekolah dan guru belum S1, kualifikasi pendidikan guru dan kepala sekolah diyakini berpengaruh terhadap mutu proses dan hasil belajar. Kualifikasi yang tinggi akan memberikan kemampuan untuk melaksanakan proses belajar dan memberikan hasil belajar dengan mutu yang terbaik sehingga siswa berpotensi dapat belajar dengan nyaman dan tidak terjadi mengulang kelas.

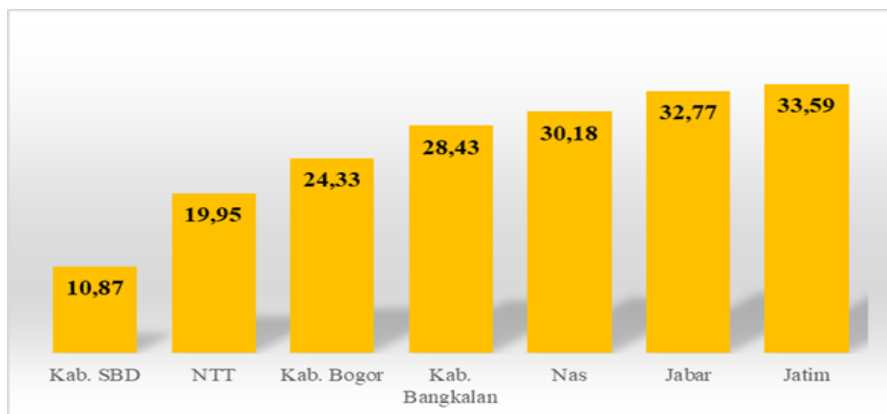
Gambar 9 tentang kualifikasi guru dan kepala sekolah yang menunjukkan bahwa SD sampel di tiga kabupaten masih belum mencapai kualifikasi pendidikan yang ditentukan, yaitu minimal S1 atau D4. Di Kabupaten Sumba Barat Daya persentase kualifikasi guru dan kepala sekolah yang belum mencapai S1 sebesar 34,454%.



Gambar 9. Persentase Kepala Sekolah dan Guru Belum S1 di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada tahun 2018/2019

Dalam DKT terutama di Sumba Barat Daya masih ditemukan guru yang belum S1, dan kepala sekolah menguatkan bahwa kompetensi pedagogiknya juga belum mumpuni. Dengan demikian upaya meningkatkan kualifikasi guru dan kepala sekolah termasuk upaya strategis yang harus segera dilakukan.

Berikut digambarkan Persentase Kepala Sekolah dan Guru dengan masa kerja  $\geq 20$  tahun.



Gambar 10. Persentase Kepala Sekolah dan Guru dengan Masa Kerja  $\geq 20$  tahun di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada tahun 2018/2019

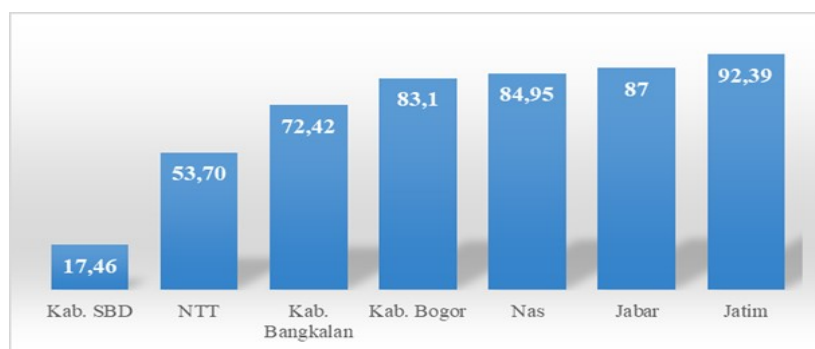
Tampak dalam Gambar 9, beberapa SD di tiga lokasi sampel diketahui persentase kepala sekolah dan guru yang berpengalaman masih rendah, yakni masa kerja mereka yang baru 20 tahun dan lebih masih kurang. Guru dan kepala sekolah yang berpengalaman, kemampuan mengajar mereka baik metode maupun substansinya tentu lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpengalaman, terlebih kemampuannya mengatasi berbagai

permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh siswa. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan agar guru-guru senior diharapkan mengajar anak-anak di kelas rendah, seperti yang banyak terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun nampaknya kebijakan semacam itu sudah tidak banyak diterapkan lagi. Untuk menjamin keterlaksanaannya alangkah baiknya jika Kemendikbud membuat kebijakan “guru senior mengajar kelas rendah”.

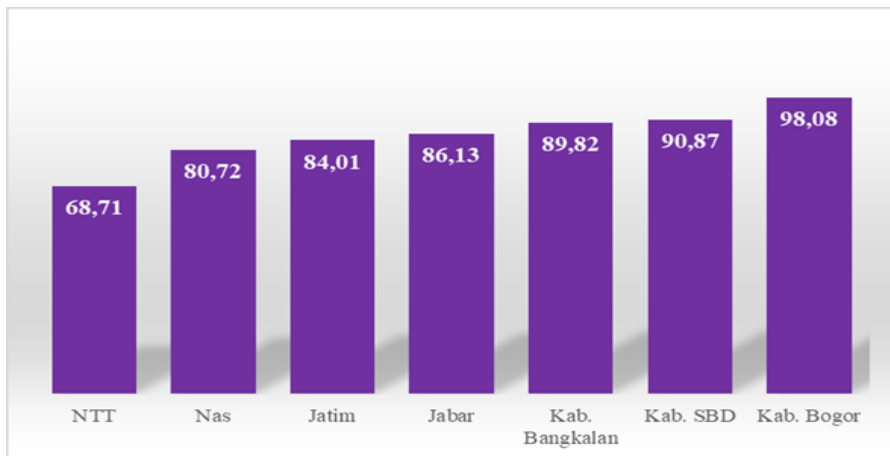
c. Persentase SD memiliki kecukupan sumber air dan toilet.

Kecukupan sumber air dan toilet memiliki peran yang penting dalam pengelolaan pendidikan. Fenomena tersebut sesuai pernyataan Rick Johnson (WHO, 2018) bahwa sanitasi sekolah merupakan kebutuhan dasar. Sejalan dengan hasil penelitian Nurhidayat (2017), bahwa salah satu variabel yang memengaruhi mengulang kelas adalah lingkungan sekolah dan kelas yang tidak menyenangkan. Kepemilikan kecukupan sumber air dan toilet juga merupakan indikator sekolah yang menyenangkan.

Diketahui bahwa masih banyak SD di daerah sampel yang belum memiliki kecukupan sumber air (lihat Gambar 11) dan toilet (lihat Gambar 12). Gambar 11 memperlihatkan begitu banyak SD yang belum memiliki kecukupan sumber air, mencapai 72% di Kabupaten Bangkalan dan 83% di Kabupaten Bogor. Tampak di Gambar 12, sekitar 2% SD di Kabupaten Bogor, 10% di Kabupaten Bangkalan, dan 9% di Kabupaten SBD belum memiliki toilet. Berarti pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian khusus agar tidak ada lagi SD di wilayah kerjanya yang tidak memiliki kecukupan sumber air dan toilet.



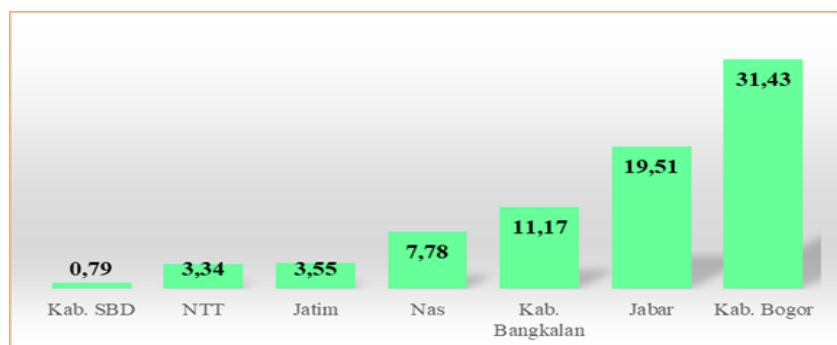
Gambar 11. Persentase SD Belum Memiliki Kecukupan Sumber Air di 3 Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada 2018/2019



Gambar 12. Persentase SD yang Memiliki Toilet di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada tahun 2018/2019

d. Proporsi SD Penyelenggaraan Kombinasi (Sistem Double Shift)

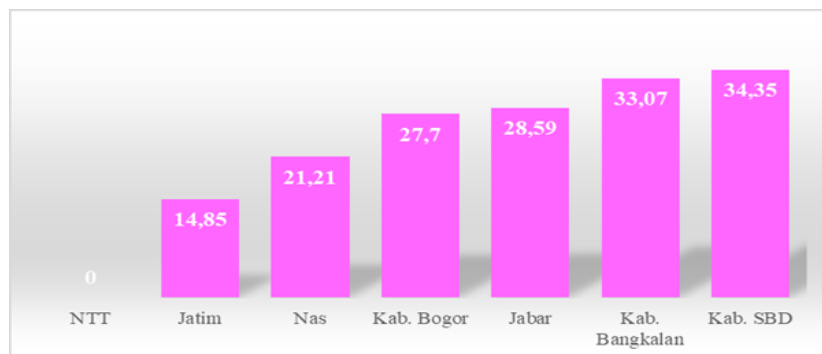
Variabel ini berkorelasi negatif secara signifikan dengan mengulang kelas dan berkorelasi positif secara signifikan dengan putus sekolah. Semakin tinggi proporsi sekolah kombinasi, AU akan semakin tinggi. Sebaliknya untuk putus sekolah, akan semakin rendah. Keduanya bisa diterima dengan pertimbangan utama anak-anak yang bekerja dan umumnya bekerja di sektor informal, waktu kerjanya bisa pagi, siang atau sore.



Gambar 13. Persentase SD yang Diselenggarakan Kombinasi di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada tahun 2018/2019

Gambar 13 memperlihatkan persentase SD sampel yang menyelenggarakan Sistem kombinasi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bangkalan lebih tinggi dari rerata provinsinya masing-masing dan rerata nasional. Untuk mengurangi AU berarti proporsi sekolah kombinasi harus dikurangi. Tanpa mempertimbangkan anak-anak yang harus bekerja pada pagi hari,

permasalahan kekurangan ruang kelas harus diatasi. Pertimbangannya, sekolah kombinasi diselenggarakan karena jumlah rombel lebih banyak dari jumlah ruang kelas, karena pada dasarnya pemerintah sudah sejak lama meniadakan sekolah kombinasi. Dari hasil DKT juga ditemukan informasi, terdapat sekolah yang kekurangan jumlah ruang kelas sekaligus kekurangan guru sehingga terpaksa menyatukan jumlah siswa sampai melebihi ketentuan. Ada salah satu SD sampel di Kabupaten Bogor yang memberikan alasan keamanan, yakni jika menyelenggarakan pendidikan pada siang dikhawatirkan akan tertimpa barang galian. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran hanya diselenggarakan pagi hari saja disatukan dengan rombongan belajar di kelas pagi. Kebijakan sekolah ini dilakukan karena jumlah ruang kelas tidak mencukupi, sehingga dua rombongan belajar terpaksa digabung menjadi satu kelas. Akibatnya jumlah siswa dalam satu rombongan belajar ada yang mencapai 50 orang dalam satu kelas. Gambar 14 memperlihatkan persentase kekurangan ruang kelas SD di 3 lokasi sampel yang memang masih tinggi. Hasil DKT memberikan informasi bahwa di Kabupaten Bogor bahkan ada yang mencapai 50%.



Gambar 14. Persentase SD yang Kekurangan Ruang Kelas di Tiga Lokasi Sampel, Provinsi dan Nasional pada tahun 2018/2019

Hasil korelasi dengan APS memperlihatkan, meningkatnya jumlah SD kombinasi akan meningkatkan putus sekolah. Hal ini kemungkinan karena waktu anak-anak bekerja tidak sesuai dengan waktu mereka harus ke sekolah. Sekolah mereka kombinasi, tapi mereka harus belajar siang, padahal siang harus bekerja juga.

## 2. Penanggulangan yang Sudah Dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Sekolah

Secara umum baik dinas pendidikan kabupaten maupun sekolah sudah berupaya menanggulangi mengulang kelas dan putus sekolah dengan mengingatkan orangtua siswa yang anaknya rawan mengulang kelas dan putus sekolah, namun upaya tersebut belum berhasil. Hal itu kemungkinan disebabkan baru menerapkan pendekatan yang bersifat eksternal, sementara yang bersifat internal tampaknya belum diwujudkan. Salah satu pendekatan yang mungkin diterapkan dalam upaya daerah/sekolah/guru mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah dengan pendekatan PDIA yang memiliki 9 tahapan yaitu i) eksplorasi; ii) sintesis; iii) perancangan; iv) kaji ulang dan iterasi; v) rintisan; vi) evaluasi; vii) evaluasi; iix) berbagi; dan ix) penyebarluasan.

## **BAB IV**

### **TANTANGAN MENGATASI DI MASA MENDATANG**

Bab terakhir ini memuat sintesis faktor penyebab mengulang kelas dan putus sekolah baik penyebab internal yang berada di lingkungan sekolah maupun penyebab eksternal yang berada di luar lingkungan sekolah. Dari hasil temuan tersebut disampaikan tentang berbagai upaya yang merupakan tantangan bagi berbagai pihak yang relevan dalam mengatasi permasalahan mengulang kelas dan putus sekolah.

Hasil analisis data sekunder menemukan bahwa faktor internal yang berkorelasi dengan mengulang kelas dan putus sekolah mencakup: i) Persentase siswa kelas awal non TK; ii) Persentase kepala sekolah dan guru belum S1; iii) Persentase kepala sekolah dan guru dengan masa kerja  $\geq 20$  tahun; iv) Persentase SD memiliki sumber air dan cukup; v) Persentase SD memiliki toilet; dan vi) Proporsi SD penyelenggaraan kombinasi (pagi & siang). Faktor eksternal adalah IPM.

Dari hasil DKT, diketahui bahwa faktor internal meliputi: i) kekurangan guru; ii) banyaknya guru honorer; iii) kompetensi mengajar dan substansi belum mencukupi; dan iv) kekurangan ruang kelas. Faktor eksternal mengulang kelas dan putus sekolah mencakup: i) status sosial ekonomi orangtua yang meliputi kemiskinan dan rendahnya pendidikan orangtua; ii) budaya; dan iii) akses menuju ke sekolah.

Upaya menanggulangi sudah dilakukan baik oleh dinas pendidikan kabupaten maupun hampir semua sekolah, namun demikian belum memberikan hasil yang optimal. Penyebabnya diduga adalah upaya yang belum menyeluruh dan belum menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang akurat.

Berkaitan dengan temuan tersebut para pihak-pihak yang berkepentingan dihadapkan pada berbagai tantangan tentang bagaimanakah strategi mengatasi siswa mengulang kelas dan putus sekolah di masa mendatang? Usulan rekomendasi kebijakan guna mengatasi siswa mengulang kelas dan putus sekolah diperlukan agar meningkatkan efisiensi pendidikan dan meningkatkan pencapaian wajib belajar dan mutu pendidikan nasional yang terbaik. Berikut

disampaikan usulan kebijakan tersebut berdasarkan penyebabnya, yakni penyebab internal dan eksternal sesuai temuan kajian ini.

## **A. REKOMENDASI TERKAIT PENYEBAB INTERNAL**

### **1. Guru**

Untuk mengatasi masalah banyaknya guru honorer yang memberatkan beban sekolah maka perlu upaya pengadaan guru yang sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi/persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Mengingat rekrutmen guru melalui jalur pengangkatan PNS tidak pernah mampu memenuhi kebutuhan, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) agar meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan guru SD melalui jalur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama bagi daerah pedesaan (terpencil) dan daerah terdepan, terpencil dan terluar (3T). Hal ini juga dengan mengingat bahwa pengangkatan PPPK langsung hanya didasarkan pada kebutuhan riil dan usulan dari institusi/daerah yang memang benar-benar membutuhkannya.

Program Guru Garis Depan) (GGD) jangan terlalu cepat diputuskan untuk dihentikan, namun sebaiknya tetap dilanjutkan dengan beberapa perbaikan/penyesuaian. Perbaikan ditekankan antara lain agar guru yang telah menandatangani “kontrak” dalam program GGD tidak dapat mengajukan pemindahan tempat penugasan (mutasi) dalam kurun waktu minimal 10 tahun.

Upaya lain untuk mengatasi banyaknya guru honorer adalah melaksanakan kebijakan distribusi guru, terlebih untuk memenuhi guru di daerah pedesaan dan 3T. Rencana kebijakan rotasi penugasan guru bersatus PNS mencakup ke daerah pedesaan dan 3T agar segera diberlakukan, namun harus didukung terlebih dahulu dengan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terkait data kebutuhan dan distribusi guru.

Untuk mengatasi masalah guru yang belum memenuhi kualifikasi maka dinas pendidikan perlu mengupayakan/mencarikan beasiswa agar para guru yang belum memenuhi kualifikasi bisa melanjutkan pendidikannya minimal sampai dengan S1/D-IV. Program yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka/sejenisnya merupakan salah satu pilihan yang rasional. Untuk meningkatkan kompetensi guru yang pendidikannya sudah sesuai kualifikasi namun masih dinilai belum kompeten, mereka perlu



diikutsertakan dalam program-program pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi guru.

Memprioritaskan pelatihan bagi para guru dari daerah pedesaan (terpencil) dan 3T dalam upaya meningkatkan kompetensi substansi dan kompetensi mengajar.

Seiring dengan itu perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas dan aktifitas Kelompok Kerja Guru (KKG), terutama di daerah pedesaan dan 3T, antara lain dengan memberikan pembinaan/pendampingan dari LPTK terdekat dan pemberian insentif pendanaan.

Terkait dengan pembelajaran, perlu perhatian khusus bagi murid-murid SD terutama di kelas rendah agar dididik oleh guru-guru yang memiliki pengalaman mengajar yang tinggi. Akan lebih baik jika upaya tersebut dijadikan kebijakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Disarankan agar semakin tinggi pengalaman mengajar guru, semakin rendah kelas yang diajar.

Demikian pula hendaknya pemerintah dan pemerintah daerah mendorong, menjadikan kebijakan dan memfasilitasi penyelenggaraan PAUD minimal satu tahun sebelum memasuki SD.

## 2. Prasarana dan Sarana

Pengadaan dan perbaikan (renovasi) sarana dan prasarana sekolah agar memprioritaskan untuk daerah pedesaan (terpencil) dan 3T. Hal ini mengingat bahwa di daerah perkotaan termasuk daerah urban (pinggiran kota), pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah jauh lebih besar kemungkinannya bisa dipenuhi berkat kemampuan orangtua dan masyarakat memberikan kontribusi dana pendidikan. Dalam pelaksanaannya tentu saja perlu ada pendampingan dan pengawasan bersama dari unsur pemerintah daerah/Dinas Pendidikan, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat.

Dinas pendidikan perlu mengupayakan agar penyelenggaraan pengajaran SD dilakukan hanya pada pagi hari. Pembangunan ruang kelas bagi sekolah yang kekurangan kelas perlu segera dilakukan agar tidak ada lagi pembelajaran di siang hari atau diselenggarakan secara kombinasi. Kendati demikian di daerah-daerah tertentu masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pembelajaran pada siang hari untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang terpaksa harus bekerja secara informal

pada pagi hari. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan jumlah ruang kelas yang perlu minimal sesuai jumlah rombongan belajar.

Kelengkapan prasarana pendidikan lainnya yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah di setiap SD adalah sumber air yang cukup dan toilet agar anak-anak nyaman dan kerasan berada di sekolah. Selain itu, pengadaan sumber air dan toilet diperlukan agar siswa dan tenaga pendidikan dapat membiasakan hidup bersih dengan sanitasi dan lingkungan sekolah yang lebih baik.

## **B. REKOMENDASI TERKAIT PENYEBAB EKSTERNAL**

Penyebab eksternal yang ditemukan terutama adalah rendahnya tingkat status sosial ekonomi yang ditandai oleh rendahnya kesejahteraan masyarakat dan rendahnya aspirasi terhadap pendidikan. Sehubungan dengan itu, disarankan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan institusi lain di wilayahnya yang terkait dengan masalah pendidikan. Hal ini diperlukan karena beberapa faktor penyebab mengulang kelas dan putus sekolah berada diluar kendali kewenangan Dinas Pendidikan. Berkenaan dengan itu Dinas Pendidikan perlu mengadakan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan mengulang kelas dan putus sekolah, yaitu antara lain dengan Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) untuk meningkatkan keterampilan orangtua sesuai/berbasis unggulan daerah/kearifan lokal dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.

Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditugaskan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran/persepsi orangtua/masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak, antara lain dengan memberikan pendidikan dan jalan keluar agar anak yang masih dalam rentang usia pendidikan dasar (7-15 tahun) tidak lagi bekerja mencari uang. Demikian pula agar anak-anak dihindarkan dari kebiasaan untuk menikah di usia muda. Program pendidikan keluarga atau pendidikan orangtua perlu dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bekerjasama dengan berbagai pihak yang relevan maupun diselenggarakan oleh sekolah dan/atau komite sekolah dengan bekerjasama dengan pihak lain yang relevan.

Peran serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dinas Pariwisata dan Budaya diperlukan untuk memberikan pemahaman/kesadaran kepada

orangtua/masyarakat agar menekan budaya menikah muda, juga agar pada acara-acara peringatan keagamaan dan/atau perayaan adat budaya tertentu sedapat mungkin tidak selalu mengikutsertakan anak-anak rentang usia pendidikan dasar, terlebih acara yang dilakukan pada jam sekolah. Upaya ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan budaya, dengan melibatkan tokoh masyarakat/adat/budaya/agama yang biasanya berpengaruh di masyarakat.

Untuk mengatasi masalah akses yang sulit karena lokasi sekolah jauh dari pemukiman maupun lokasi sekolah memang terletak di daerah 3T, hendaknya pemerintah daerah berupaya memajukan daerahnya di antaranya dengan membangun jalan penghubung pemukiman dengan sekolah dan pengadaan sarana transportasi.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, pendekatan *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA) sebagai upaya mencari solusi dapat diterapkan yang diawali dengan pelatihan dan pendampingan dan selanjutnya penyebarluasan yang sudah memperlihatkan keberhasilannya di suatu lokasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N.S. 2011. Pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta: Sabda Media.
- Astari, G. A. R., Srinadi, I.G.A.M., Susilawati, M. Agustus, 2013.  
Pemodelan Jumlah Anak Putus Sekolah di Provinsi Bali dengan Pendekatan Semi Parametric Geographycally Weighted Poisson Regression. E-Jurnal Matematika, 2 (3) 29 – 34.
- Badan Pusat Statistik. 2019.  
(<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=8>) diakses 14 Maret 2019
- Badan Pusat Statistik.go.id <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, (diakses 31 Oktober 2019 Jam 13:10 WIB)
- Christina. 1991. Pengalaman Sebagai suatu Proses. Bandung: Rosda Karya.
- Danim, S. 2002. Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayatullah, F. 2 Desember 2013. <https://www.solopos.com/kebijakan-tidak-naik-kelas-siswa-sd-dihapus-470558>, (diakses 3 Oktober 2019 jam 11:55 WIB)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
[https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi\\_4B619F17-97F5-4B93-BB0B-7F83B5512B0B\\_.pdf](https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_4B619F17-97F5-4B93-BB0B-7F83B5512B0B_.pdf). diakses 14 Maret 2019
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2012/2013. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Ikhtisar Data Pendidikan 2014/2015. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Bengkulu. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Ikhtisar Data Pendidikan 2015/2016. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ikhtisar Data Pendidikan. 2016/2017. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan. 2017/2018. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019..Indonesia.. Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan. 2018/2019. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kompas, 2013.  
<https://edukasi.kompas.com/read/2013/12/03/1223398/Kebijakan.Ta>  
 k.Boleh. Tinggal.Kelas.Masih.Bingungkan.Guru.
- Musfiquon. 2007. Mengenai Putus Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhidayat, H. Strategi mencegah dan menanggulangi putus sekolah di sekolah dasar 10 Oktober 2017.  
<https://www.kompasiana.com/www.hida.nurhidayat.com/59dbb54e4b0a685470131d93/strategi-mencegah-dan-menanggulangi-tinggal-kelas-dan-putus-sekolah-di-sekolah-dasar?page=all> Diakses 10 November 2019.
- Perhati, T.A., Indahwati, Susetyo, B. 2017. Identifikasi Karakteristik Anak Putus Sekolah di Jawa Barat dengan Regresi Logistik. Indonesian Journal of Statistics and Applications, 1 (1), 56 – 65

- <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/11/14/cenderung-berdampak-negatif-bagi-anak-kebijakan-tinggal-kelas-perlu-dikaji>, 14 November 2018 (diakses 29 Juli 2019 pukul 09:25 WIB)
- Purbasari, D. A. 2014. Tugas Akhir: Pemodelan Angka Putus Sekolah tingkat SLTP dan Sederajat di Jawa Timur Tahun 2012 dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik Ordinal. ITS Surabaya: Jurusan Statistika FMIPA (<http://digilib.its.ac.id/ITS-paper-13121140006755/35181>)
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rick Johnson (<https://www.cnnindonesia.com>, 2018). 2018. Separuh Sekolah di Dunia Tak Punya Toilet dan Air Bersih <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180827152218-134-325221/who-separuh-sekolah-di-dunia-tak-punya-toilet-dan-air-bersih> Diakses 31 Oktober 2019.
- Sembilan Tahap Inti Proses PDIA INOVASI. 2018. [https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2018/01/171002-PDIAflyer-portrait\\_ID-1.pdf](https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2018/01/171002-PDIAflyer-portrait_ID-1.pdf) diakses 12 November 2019
- Tujuh Alasan Pentingnya Pendidikan Anak PAUD Menurut Para Ahli <https://www.paud.id/2015/03/7-alasan-pentingnya-pendidikan-anak-paud-menurut-para-ahli.html> Para ahli. <https://www.paud.id/2015/03/7-alasan-pentingnya-pendidikan-anak-paud-menurut-para-ahli.html>. diakses 4 Desember 2019
- Wahab, R. <https://www.sekolahdasar.net/2016/10/anak-tidak-naik-kelas-murni-karena-kesalahan-guru.html?m=0>. Diakses 12 November 2019.
- Wicaksono, T. Y. 2018. <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/11/14/cenderung-berdampak-negatif-bagi-anak-kebijakan-tinggal-kelas-perlu-dikaji>, 14 November 2018. diakses 3 Oktober 2019 pukul 14:35 WIB)







Pemerintah telah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar sejak tahun 2008, dimana setiap anak usia 7 sampai dengan 15 tahun wajib bersekolah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk percepatan wajib belajar sembilan tahun dengan menerapkan Kurikulum 2013. Dalam penerapan Kurikulum 2013 tersebut telah diamanatkan agar tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas/tidak naik kelas/mengulang kelas. Namun faktanya, masih terdapat siswa sekolah dasar yang mengulang kelas dan putus sekolah.

Terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi siswa mengulang kelas dan putus sekolah. Faktor internal meliputi kekurangan guru, banyaknya guru honorer, kompetensi mengajar dan substansi belum mencukupi, dan kekurangan ruang kelas sedangkan faktor eksternal meliputi status sosial ekonomi orangtua, budaya, dan akses menuju ke sekolah.



**Pusat Penelitian Kebijakan**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**2020**

ISBN 978-602-0792-63-7



9

786020

792637